

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian Indonesia yang mulai bangkit pasca krisis moneter 1997-1998 belum menunjukkan angka yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan tahun 2009 kembali terjadi krisis keuangan yaitu krisis keuangan global yang melumpuhkan perekonomian negara-negara berkembang dan sebagian Negara maju juga tidak luput dari dampak negatifnya.

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan pendapatan masyarakat terendah di Asia Tenggara, hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Indonesia memiliki kemampuan ekonomi lemah akibat pendapatan yang rendah sehingga kesejahteraan pun rendah. Dikhawatirkan krisis keuangan global akan lebih memperburuk kondisi ekonomi Indonesia antara lain tingginya angka pengangguran yang dikhawatirkan mendorong tingginya kriminalitas, kesejahteraan rendah, pendidikan dan kesehatan rendah.

Dalam upaya menanggulangi berbagai permasalahan terutama masalah ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya melalui pelaksanaan berbagai program pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan data publikasi kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat (Menkokesra:2008) menyatakan bahwa upaya pemerintah yang telah dilakukan

dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memulihkan perekonomian melalui beberapa strategi:

- a. Bantuan pada *Cluster* program Bantuan Sosial, diantaranya BLT (Bantuan Langsung Tunai), Raskin dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
- b. Bantuan pada *Cluster* program Pemberdayaan Masyarakat, yaitu: PNPM-Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri).
- c. Bantuan pada *Cluster* program UMKM Untuk Kemandirian Masyarakat, yaitu: KUR, KUBE, dan lain-lain

Cluster pertama yaitu program Bantuan Sosial, *Cluster* ini merupakan kelompok program bantuan langsung yang ditujukan untuk membantu masyarakat golongan paling bawah dalam upaya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan harian, pendidikan, maupun kesehatan (*konsumtif*) yang dalam penyalurannya memosisikan masyarakat sebagai penerima pasif. Salah satu yang paling populer pada *Cluster* ini adalah BLT yang disalurkan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM akibat pencabutan subsidi dari pemerintah, dampak program ini bersifat *instant* dikarenakan dampaknya bisa dilihat langsung melalui pemanfaatan sejumlah uang oleh penerimanya.

Cluster kedua yaitu program Pemberdayaan Masyarakat, *Cluster* ini berisi program-program hasil konsolidasi berbagai kementerian dan lembaga dalam upaya menemukan upaya pemulihan perekonomian sekaligus mengangkat isi terpenting yaitu kemandirian masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal (*local wisdom*). Program Pemberdayaan Masyarakat menghadirkan bentuk maupun formasi baru pergerakan dan penyadaran masyarakat akan pentingnya

pembangunan daerah dan kemajuan ekonomi dengan melihat dan menggali secara optimal berbagai potensi baik SDM maupun potensi sumber daya alam. Salah satu yang paling populer pada *Cluster* ini adalah PNPM-Mandiri Perdesaan, yaitu program pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam bentuk bantuan dana yang dikompetisikan pada tingkat kecamatan penerima bantuan program sehingga setiap desa berusaha sekuat tenaga menggali potensi SDM maupun sumber daya alam untuk mendapatkan anggaran pembangunan prasarana (Umum, pendidikan, kesehatan, maupun keterampilan) dan anggaran kegiatan ekonomi (dana simpan pinjam bergulir). Pada *Cluster* ini masyarakat dituntut untuk siap menyambut bantuan pemerintah dengan kesiapan swadaya, kerjakeras, kerjasama, dan nilai sportifitas yang tinggi melalui pembelajaran tahapan kegiatan yang sangat panjang. Permasalahan yang terjadi pada PNPM-Mandiri Perdesaan adalah kewajiban pengelolaan dana bergulir yang harus dipertanggungjawabkan dan dikelola oleh kecamatan penerima bantuan dan sekaligus menjadi syarat mutlak penilaian keberhasilan program PNPM-Mandiri Perdesaan pada kecamatan penerima bantuan, sedangkan kemacetan selalu saja terjadi bahkan bertambah besar setiap bulannya.

Cluster ke tiga adalah program UMKM Untuk Kemandirian Masyarakat, *Cluster* ini berisi program-program bantuan modal kerja maupun keuangan dengan berbagai kemudahan akses bagi UMKM. *Cluster* ini ditujukan kepada UMKM yang dianggap memiliki potensi besar untuk maju dan berkembang melalui penambahan modal dan penyalurannya melalui kementerian KUKM

ataupun bank-bank pemerintah. Salah satu yang paling populer pada *Cluster* ini adalah KUR yang disalurkan oleh BRI.

Yang paling populer saat ini adalah *Cluster* Program Pemberdayaan Masyarakat yang terhimpun dalam satu naungan program PNPM-Mandiri, akan tetapi masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana PNPM yaitu kemacetan kredit pada penyaluran dana ekonomi bergulir (SPP). Pengelolaan keuangan untuk dana bergulir dan penyaluran dana pembangunan prasarana fisik dilakukan oleh sebuah lembaga yang bernama UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang berdomisili di wilayah kantor kecamatan penerima bantuan PNPM.

UPK Kecamatan Samarang adalah salah satu Unit Pengelola Kegiatan program PNPM-Mandiri Perdesaan yang berada di kabupaten Garut Jawa Barat. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah lembaga yang bertugas mengelola dana yang disalurkan oleh pemerintah dalam program PNPM-Mandiri Perdesaan dan awasi serta dibina oleh satuan kerja (satker) dari pusat, propinsi dan kabupaten), selain itu dalam pelaksanaan tahun program diberikan pendampingan konsultan/fasilitator untuk setiap kecamatan baik Fasilitator Teknik (FT) maupun Fasilitator Kecamatan (FK).

UPK Kecamatan Samarang merupakan lembaga keuangan non bank yang dibentuk sebagai perwakilan masyarakat kecamatan Samarang kabupaten Garut, dalam hal ini berstatus pegawai swasta pada program pemerintah dengan prinsip kerja mengacu pada PTO (Petunjuk Teknis Operasional) sebagai acuan langkah kerja dan pelaksanaan program PNPM-Mandiri Perdesaan.

Dalam aktifitasnya UPK Kecamatan Samarang menyalurkan dana program PNPM-Mandiri Perdesaan untuk kegiatan fisik/prasarana dan ekonomi/simpan pinjam. UPK Kecamatan Samarang merupakan lembaga keuangan non bank, modal awal yang didapatkan oleh UPK adalah sebesar maksimal 25% dari total alokasi PNPM-Mandiri Perdesaan pada setiap kecamatan yang dikelola sebagai dana abadi yang harus dijaga kelestariannya serta bergulir dan berkesinambungan, sedangkan 75% total alokasi PNPM-Mandiri Perdesaan disalurkan untuk pendanaan usulan kegiatan fisik/prasarana pada masing-masing desa. Untuk kegiatan ekonomi maupun prasarana/fisik di dalamnya terdapat anggaran operasional sebesar 5% yaitu 2% untuk operasional UPK selama satu tahun program dan 3% untuk operasional TPK (Tim Pengelola Kegiatan pada setiap desa) selama satu tahun program, sehingga dari alokasi 100% dana program PNPM-Mandiri Perdesaan pada suatu kecamatan 95% wajib disalurkan tanpa potongan apapun dan 5% untuk kegiatan operasional (TPK dan UPK).

Tujuan UPK yang paling utama adalah menyediakan sumber modal bagi masyarakat kecamatan penerima bantuan program PNPM-MP baik pada masa program maupun setelah program berakhir (*Passed Out*), juga mampu menghasilkan laba sehingga biaya-biaya tertutupi dan kesejahteraan pengurus terjamin. Hal ini bertujuan agar pada saatnya nanti UPK bisa tumbuh mandiri dan memajukan ekonomi kecamatan penerima bantuan melalui pengelolaan dana bergulir walaupun tambahan modal program PNPM dari pusat sudah tidak ada lagi.

Untuk dapat menghasilkan laba maka kegiatan operasional perusahaan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemampuan UPK menghasilkan laba hanya bisa diwujudkan jika kemacetan kredit (tunggalan) pada kelompok-kelompok penerima bantuan dapat ditekan se-kecil mungkin. Laba berupa jasa pinjaman diharapkan dapat menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan UPK dalam menjalankan kegiatan operasinya dan kontinuitas perusahaan menjadi lebih terjamin, apabila biaya lebih besar dari pendapatannya hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba tidak tercapai atau mengalami kerugian. Dalam hal ini dikhawatirkan UPK akan memakan modal yang seharusnya menjadi dana abadi yang terus berkembang bukan sebaliknya justru terkikis oleh pengeluaran operasional.

UPK Kecamatan Samarang berdiri sejak 23 September 2003, saat itu program PNPM Perdesaan bernama PNPM-PPK (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Pengembangan Kecamatan). Ada dua jenis dana bergulir atau ekonomi yang dikelola oleh UPK Kecamatan Samarang, yaitu UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan SPP (Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan). Kedua jenis dana bantuan ini memiliki sasaran yang sama yaitu RTM (Rumah Tangga Miskin) produktif, atau masyarakat miskin yang memiliki potensi dan keinginan untuk maju dan meningkatkan kesejahteraan hidup yang ditunjukkan dengan kerja kerasnya dalam bidang usaha. UEP disalurkan pemerintah dari tahun 1998-2007, dan sejak tanggal 30 April 2007 seiring pergantian nama PNPM PPK menjadi PNPM-Mandiri Perdesaan maka tidak ada lagi penyaluran UEP dan hanya satu jenis dana bergulir yaitu dana SPP.

Kemacetan dana SPP di UPK Kecamatan Samarang terlihat dalam data di bawah ini.

TABEL 1.1
KEMACETAN KREDIT SPP (SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN)
UPK KEC.SAMARANG
BULAN JANUARI 2007-JUNI 2009

NO	BULAN	TAHUN	SALDO PINJAMAN (SPP) (RP)	KEMACETAN POKOK KREDIT (RP)
1	JANUARI	2007	219.514.826	40.670.658
2	FEBRUARI	2007	196.235.159	42.174.323
3	MARET	2007	170.914.325	41.636.823
4	APRIL	2007	152.322.489	47.401.653
5	MEI	2007	137.178.289	49.178.289
6	JUNI	2007	302.468.539	49.789.370
7	JULI	2007	303.130.086	51.167.583
8	AGUSTUS	2007	281.612.358	50.225.763
9	SEPTEMBER	2007	292.371.222	57.500.386
10	OKTOBER	2007	278.334.083	60.698.775
11	NOVEMBER	2007	228.832.605	64.061.769
12	DESEMBER	2007	216.328.456	63.223.728
13	JANUARI	2008	303.263.760	61.984.591
14	FEBRUARI	2008	271.226.011	124.464.719
15	MARET	2008	350.604.864	63.625.695
16	APRIL	2008	311.261.548	65.890.998
17	MEI	2008	265.368.637	61.606.134
18	JUNI	2008	228.618.287	66.464.118
19	JULI	2008	253.146.788	65.585.118
20	AGUSTUS	2008	422.179.579	56.958.743
21	SEPTEMBER	2008	396.827.866	60.573.697
22	OKTOBER	2008	353.758.803	60.304.634
23	NOVEMBER	2008	346.728.056	65.069.301
24	DESEMBER	2008	428.179.949	62.992.446
25	JANUARI	2009	383.482.387	63.586.551
26	FEBRUARI	2009	334.556.356	59.952.187
27	MARET	2009	550.165.691	65.036.522
28	APRIL	2009	492.649.528	65.699.525
29	MEI	2009	478.829.536	66.725.325
30	JUNI	2009	416.424.715	69.166.379

Sumber: Laporan Keuangan Bulanan UPK Samarang, Juni 2009

Data Tabel 1.1 di atas memperlihatkan kemacetan kredit SPP terbesar kurun waktu 30 bulan periode Januari 2007-Juni 2009 pada UPK kecamatan Samarang kabupaten Garut, yaitu pada bulan Februari 2008 sebesar Rp. 124.464.719, sedangkan kemacetan terendah dalam kurun waktu 30 bulan periode Januari 2007-Juni 2009 yaitu pada bulan Januari 2007 sebesar Rp. 40.670.658. berdasarkan pada data di atas menjelaskan bahwa selama periode 30 bulan hanya 11 kali mengalami penurunan kemacetan kredit dan sebanyak 19 kali mengalami kenaikan kemacetan kredit. Apabila dilihat dari data kemacetan kredit selama 30 bulan periode Januari 2007-Juni 2009 menunjukkan adanya masalah kemacetan kredit yang terjadi pada UPK kecamatan Samarang, hal tersebut ditunjukkan dengan kenaikan jumlah kemacetan kredit sebanyak 19 kali selama 30 bulan periode Januari 2007-Juni 2009.

UPK Kecamatan Samarang bukan satu-satunya UPK yang mengalami kemacetan kredit SPP, akan tetapi jika dilihat dari data terakhir yang diperoleh menunjukkan bahwa UPK Kecamatan Samarang merupakan salah satu UPK yang tingkat kemacetannya paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

TABEL 1.2
POSISI KEMACETAN KREDIT UPK (UNIT PENGELOLA KEGIATAN)
KABUPATEN GARUT BULAN JUNI 2009

NO	KECAMATAN	KEMACETAN KREDIT (SPP)
		POKOK (RP)
1	Sukaesmi	0
2	Cilawu	2.771.000
3	Mekarmukti	3.220.200
4	Banjarwangi	12.840.401
5	Cisewu	29.000.900
6	Bungbulang	35.499.401

LANJUTAN TABEL 1.2
POSISI KEMACETAN KREDIT UPK (UNIT PENGELOLA KEGIATAN)
KABUPATEN GARUT BULAN JUNI 2009

NO	KECAMATAN	KEMACETAN KREDIT (SPP)
		POKOK (RP)
7	Cibalong	51.655.699
8	Cisompet	52.277.550
9	Samarang	69.166.379

Sumber : Laporan Kolektibilitas Pinjaman SPP Kabupaten Garut, Juni 2009

Data Tabel 1.2 di atas memperlihatkan data kemacetan kredit SPP pada 9 kecamatan penerima bantuan PNPM-Mandiri Perdesaan periode bulan Juni 2009. Dapat dilihat dengan jelas bahwa dari 9 kecamatan hanya 1 kecamatan yang tidak mengalami kemacetan kredit, yaitu kecamatan Sukaresmi. 8 Kecamatan lainnya mengalami kemacetan kredit dengan jumlah yang berbeda-beda, akan tetapi UPK kecamatan Samarang merupakan UPK dengan kemacetan tertinggi dibandingkan dengan 8 UPK kecamatan lain di kabupaten Garut.

Berdasarkan data di atas tentunya menjadi salah satu masalah yang terjadi pada UPK kecamatan Samarang dikarenakan selain sebagai kecamatan yang paling banyak terjadinya kemacetan kredit juga adanya peringatan dari TKPP (Tim Koordinasi dan Pengawasan Program) mengenai sanksi program terhadap kecamatan yang bermasalah termasuk kemacetan kredit. Dengan adanya masalah tersebut kini UPK kecamatan Samarang melakukan berbagai upaya untuk dapat menaggulangi masalah tersebut, diantaranya adalah dengan penguatan kelembagaan pendukung UPK dengan cara memperketat standar kredit terhadap anggota kelompok SPP (simpan pinjam khusus perempuan). Hasil penelusuran

UPK kecamatan Samarang menemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan kredit adalah adanya rekayasa data yang dilakukan oleh anggota calon peminjam pada saat verifikasi terkait pendapatan usaha, pengalaman usaha dan juga penyalahgunaan dana pinjaman yang tidak sesuai dengan tujuan awal pengajuan pinjaman. Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kemacetan kredit adalah lemahnya kemampuan ekonomi anggota kelompok peminjam disebabkan oleh pendapatan usaha yang kecil.

Di bawah ini merupakan pendapatan rata-rata perbulan anggota kelompok peminjam dana SPP Program PNPM-Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Samarang Tahun 2009.

TABEL 1.3
PENDAPATAN RATA-RATA PERBULAN ANGGOTA KELOMPOK
PEMINJAM DANA SPP PROGRAM PNPM-MANDIRI PERDESAAN
UPK KECAMATAN SAMARANG TAHUN 2009

No.	Jenis Usaha	Rata-rata Pendapatan Perbulan (Rp)
1.	Pertanian	300.000 – 700.000
2.	Peternakan	500.000 – 1.000.000
3.	Perikanan	300.000 – 700.000
4.	Home Industri	750.000 – 1.000.000
5.	Perdagangan	1.000.000 – 1.500.000
6.	Kerajinan dan Keterampilan	300.000 – 700.000

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Kelompok UPK Kecamatan Samarang, Juni 2009

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan tentang rata-rata pendapatan perbulan anggota kelompok peminjam dana SPP di UPK kecamatan Samarang berdasarkan jenis usaha, dimana jenis usaha yang tertinggi dalam rata-rata pendapatan perbulan yaitu perdagangan sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000

dan jenis usaha yang terendah dalam rata-rata pendapatan perbulan yaitu pertanian dan kerajinan atau keterampilan sebesar Rp. 300.000-Rp. 700.000.

Berdasarkan permasalahan diatas yang menunjukkan kemacetan kredit yang semakin besar pada setiap bulannya di UPK kecamatan Samarang, apabila tidak cepat ditanggulangi dikhawatirkan hal tersebut dapat mengakibatkan tidak tercapainya optimalisasi pengelolaan dana bergulir.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka perlu diadakan penelitian mengenai **”Pengaruh Pendapatan Usaha Terhadap Kemampuan Pengembalian Kredit SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) PNPM-Mandiri Perdesaan”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, analisis data faktor - faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit SPP Program PNPM-MP di UPK Kecamatan Samarang diukur dari nilai *Non Performing Loan* (NPL). Faktor - faktor yang mempengaruhi NPL sebagai variabel bebas dibagi tiga kategori yakni aspek individu, sistem dan mekanisme, dan kelembagaan. Faktor individu mencakup tingkat pendidikan anggota kelompok, persepsi anggota kelompok terhadap kredit, pendapatan anggota kelompok, keaktifan dalam kelompok, dan status keanggotaan. Faktor sistem dan mekanisme mencakup tanggung renteng, nilai agunan, sanksi, *reward*, lama penyaluran kredit, dan prosedur penyaluran kredit. Faktor kelembagaan mencakup kepemimpinan, budaya organisasi, prosedur

administrasi, pengelolaan biaya administrasi, pelaporan, dan hubungan lembaga dengan anggota kelompok.

Banyak hal yang dapat mempengaruhi kemacetan kredit, diantaranya adalah pendapatan usaha anggota kelompok yang rendah, karena dengan rendahnya pendapatan usaha anggota kelompok dapat menyebabkan terjadinya berbagai masalah diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran kredit.

UPK kecamatan Samarang sebagai lembaga jasa penyedia kredit harus berupaya mencari cara yang paling tepat untuk menekan tingkat kemacetan, cara yang banyak ditempuh adalah dengan meningkatkan pembentukan tim penyehatan pinjaman dan pembinaan administrasi serta bantuan pengembangan usaha untuk mendukung nasabah dalam peningkatan kemampuan ekonomi keluarga maupun kewajibannya dalam membayar pinjaman. Tentunya sebagai salah satu lembaga penyedia jasa kredit akan selalu dihadapkan pada munculnya berbagai masalah, diantaranya adalah kemacetan kredit. Hal tersebut yang kini sedang dialami oleh UPK kecamatan Samarang, dimana kemacetan kredit menjadi salah satu masalah yang harus segera ditanggulangi agar dampak dari masalah tersebut tidak bertambah besar.

Identifikasi terhadap upaya-upaya UPK di dalam melakukan peningkatan kinerja keuangan untuk meningkatkan kemampuan pengembalian kredit, dapat diteliti melalui beberapa pendekatan. Namun dalam penelitian ini pendekatan yang diduga berpengaruh terhadap kemampuan pengembalian kredit menggunakan pendekatan Pendapatan Usaha.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pendapatan usaha anggota kelompok SPP di UPK kecamatan Samarang kabupaten Garut?
2. Bagaimana gambaran kemampuan pengembalian kredit SPP di UPK kecamatan Samarang kabupaten Garut?
3. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Usaha terhadap Kemampuan Pengembalian Kredit SPP di UPK kecamatan Samarang kabupaten Garut?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan data dan informasi mengenai Pengaruh Pendapatan Usaha terhadap Kemampuan Pengembalian Kredit SPP di UPK kecamatan Samarang kabupaten Garut dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui gambaran pendapatan usaha anggota kelompok SPP di UPK kecamatan Samarang kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui kemampuan pengembalian kredit anggota kelompok SPP di UPK kecamatan Samarang kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Usaha terhadap Kemampuan Pengembalian Kredit SPP di UPK kecamatan Samarang kabupaten Garut.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoritis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu Ekonomi Manajemen, khususnya pada bidang Manajemen Keuangan, yang menyangkut Pendapatan Usaha dan Kemampuan Pengembalian Kredit. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi akademisi dalam pengembangan teori manajemen keuangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek praktis (guna laksana) yaitu memberikan masukan positif bagi lembaga keuangan khususnya UPK Kecamatan Samarang kabupaten Garut untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pengelolaan dan penyaluran kredit SPP.